

EKONOMI NTB 2021 BERHASIL TUMBUH POSITIF DI TENGAH PANDEMI



<https://insidelombok.id/berita-utama/ekonomi-ntb-2021-berhasil-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi/>

Mataram (Inside Lombok) – Pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2021 tercatat tumbuh 2,30 persen dibandingkan dengan 2020. Melihat dari sisi produksi, sektor konstruksi menjadi kontribusi paling besar penyumbang pertumbuhan ekonomi NTB di 2021, yakni sebesar 8,94 persen. Dari sisi pengeluaran komponen ekspor luar negeri sebesar 19,72 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin menjelaskan pertumbuhan ekonomi NTB bisa tumbuh 3,16 persen di triwulan IV 2021 untuk year on year (y on y). Kendati pertumbuhan ekonomi NTB berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional triwulan IV yang mencapai 5,02 persen.

Artinya ekonomi NTB masih di bawah angka pertumbuhan nasional untuk triwulan IV 2021. Untuk q to q mengalami pertumbuhan kontraksi di triwulan IV 2021 dibandingkan triwulan III 2021, tumbuh -0,53 persen. Walaupun pertumbuhan secara y on y mengalami peningkatan, tapi secara quarter to quarter (q to q) pertumbuhan penurunan. “Jadi kita di 2021 secara keseluruhan dari triwulan I-IV pertumbuhan ekonomi NTB 2,30 persen, baik dengan tambang maupun non tambang,” tutur Wahyudin, Senin (7/3).

Dari produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi NTB yang tidak masuk kategori pertambangan bijih logam secara y on y pada triwulan IV 2021 tumbuh lebih tinggi sebesar 4,09 persen dibandingkan triwulan IV 2020. Namun demikian q to q tanpa pertambangan bijih logam justru lebih dalam lagi kontraksinya 2,57 persen. Sedangkan secara total sepanjang 2021 tumbuh 2,85 persen tanpa tambang “Pertumbuhan y on y yang paling tinggi adalah terjadi triwulan ke 2 pada 2021 yaitu 4,77 persen, ini pertumbuhan dengan pertambangan, sedangkan tanpa tambang selama periode Covid-19 sebesar 5,79 persen,” terangnya. Jika melihat pertumbuhan ekonomi triwulan IV secara q to q pertumbuhan

ekonomi dari sisi akomodasi, makan dan minum memiliki pertumbuhan yang paling tinggi 37,91 persen, kedua transportasi dan gudang 18,85 persen, ketiga pertambangan 11,35 persen.

Sedangkan secara y on y pertumbuhan PDRB yang tertinggi triwulan IV adalah dari kategori pengadaan listrik dan gas 11,14 persen, transportasi dan pergudangan 8,13 persen, jasa kesehatan 7,63 persen.

“Masih didominasi oleh pertanian, pertambangan, perdagangan. Di mana tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar pada PDRB NTB,” ujarnya.

Sementara itu, menurut lapangan usaha sumber pertumbuhan ekonomi NTB paling besar bersumber dari perdagangan sebesar 0,91 persen pada triwulan IV. Dari data yang ada dari sisi konstruksi 0,74 persen.

“Paling tidak kita melihat dua kategori yang paling tinggi memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi NTB triwulan IV 2021 secara y on y,” katanya. (dpi).

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/ekonomi-ntb-2021-berhasil-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi/di> akses tanggal 10 Februari 2022;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/185245/bps-ekonomi-ntb-tumbuh-230-persen-pada-2021>, diakses tanggal 10 Februari 2022;
3. <https://dengar.id/ekonomi-ntb-tumbuh-230-persen/> akses tanggal 10 Februari 2022;
4. <https://mataramradio.com/2022/02/07/ekspor-luar-negeri-tertinggi-ekonomi-ntb-tumbuh-316-persen/diakses> tanggal 10 Februari 2022;

Catatan:

Hakekat dari otonomi daerah adalah kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah, mardiasmo (2002) memberika pendapat bahwa dalam era otonomi daerah, daerah tidak hanya menjalankan instruksi pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang sebelumnya bisa dikatakan terpasung. pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan kepada pusatterakit pembiayaan dan pengelolaan daerah.¹

¹ Priyo Hari Ady, “Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi dan relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi” di https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1318/2/ART_Priyo%20Hari%20Adi_Kemampuan%20Keuangan%20Daerah_Full%20text.pdf, diakses tanggal 10 Februari 2022

Survei Sosial Ekonomi (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu sumber informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data Kor yang disajikan dalam publikasi BPS estimasinya mencakup hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu karena Susenas dilaksanakan setiap tahun, khususnya untuk Data Kor, maka data Susenas dapat digunakan untuk melihat perkembangan/perubahan tingkat kesejahteraan rakyat dari tahun ke tahun.²

Informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah dikumpulkan melalui Susenas, digunakan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai indikator pencapaian kesejahteraan rakyat. Indikator tersebut meliputi indikator di bidang pendidikan (angka partisipasi sekolah dan murni), bidang kesehatan (angka morbiditas, pemanfaatan fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan), bidang fertilitas dan KB (penolong persalinan, umur perkawinan pertama, partisipasi KB dan inisiasi menyusui dini), bidang perumahan (kondisi tempat tinggal, sumber air minum, memasak/mandi/cuci), bidang teknologi informasi (kepemilikan HP dan akses internet dalam pemanfaatan teknologi informasi), serta indikator lainnya seperti akses terhadap bantuan/program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.³

Upaya untuk terus meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan kerja, menjadi suatu strategi yang terus di upayakan untuk mencapai cita-cita bernegara. Keluaranya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibuat dengan Konsep Omnibus Law mencoba untuk mengatur kembali berbagai macam regulasi terkait untuk dapat menciptakan suatu iklim regulasi yang tidak berbelit-belit dan sangat birokratis. Upaya untuk mempermudah perizinan khususnya dalam bidang investasi menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU ini.

Sebagai mana asas-asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan UU ini antara lain adalah:

- a) pemerataan hak;
- b) kepastian hukum;
- c) kemudahan berusaha;
- d) kebersamaan; dan
- e) kemandirian.⁴

Lebih jauh, Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a) menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya

² Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB, 2021, BPS NTB , <https://ntb.bps.go.id/publication/download.html?>

³ Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB, 2021, BPS NTB

⁴ Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

- b) menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁵ Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja